

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN PADA KAB./KOTA TERMISKIN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**AMINAH
1505026016**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Aminah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

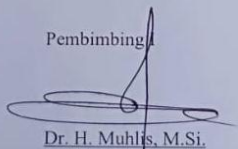
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Aminah
NIM : 1505026016
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab/Kota Termiskin. di Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Dengan ini kami setuju, dan mohon skripsi saudara tersebut kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

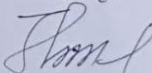


Dr. H. Muhlis, M.Si.

NIP. 19610117 198803 1 002

Semarang, 20 Desember 2019

Pembimbing II



Warno, S.E., M.Si.

NIP. 19830721 201503 1 002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aminah
NIM : 1505026016
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab/Kota Termiskin di Jawa Tengah Tahun 2013-2018

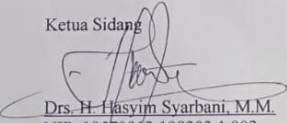
Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 26 Desember 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 26 Desember 2019

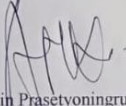
Mengetahui,

Ketua Sidang


Drs. H. Hasvim Svarbani, M.M.

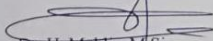
NIP. 19570913198203 1 002

Penguji I


Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si.

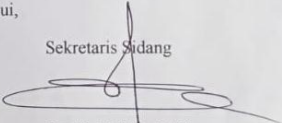
NIP. 19790512200501 2 004

Pembimbing I


Dr. H. Muhlis, M.Si.

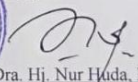
NIP. 19610117198803 1 002

Sekretaris Sidang


Dr. H. Muhlis, M.Si.

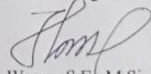
NIP. 19610117198803 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 19690830199403 2 003

Pembimbing II


Warno, S.E., M.Si.

NIP. 19830721201503 1 002



MOTTO

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^ج

“.....Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”

(QS. Al-Hasyr (59): 7)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua saya

Bapak A. Basyuni dan Ibu Sabar Supiyah yang selalu tulus mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan baik moril maupun materiil yang tiada hentinya kepada penulis, semoga penulis bisa menjadi insan yang bermanfaat untuk sesama dan bisa membahagiakan dan membanggakan kalian.

Kakak-kakak saya

Ahmad Hasan Khotib, Suyanti, dan Ahmad Mualip yang telah mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan menjadi orang-orang yang penulis direpotkan hingga sekarang.

Keluarga Besar di rumah

Terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi maupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2019

Deklarator



Aminah

NIM 1505026016

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya

الطَّب *al-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-....* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan ekonomi yang tercermin dari peningkatan nilai PDRB tidak selalu diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Selain itu lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap semua angkatan kerja sehingga angka pengangguran mengalami peningkatan dan berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh PDRB dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Sampel penelitian ini adalah 7 kabupaten di Jawa Tengah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data PDRB, pengangguran dan kemiskinan tahun 2013-2018 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics 21*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan dilihat dari t hitung yang diperoleh -2,565 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,039. Besar pengaruh adalah -0,000200 dengan tingkat signifikansi 0,015. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dilihat dari t hitung yang diperoleh 2,837 lebih besar dari t tabel yaitu 2,039. Besar pengaruh adalah 0,666130 dengan tingkat signifikansi 0,008.

Kata kunci: Kemiskinan, PDRB dan pengangguran.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Nurudin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dr. H. Muhlis, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, dan Warno, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan dan memberikan semangat selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis Bapak A. Basyuni dan Ibu Sabar Supiyah, kakak-kakak, beserta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan demi kesuksesan studi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Arina, Ipeh, Ari, Fizah dan Riyanti yang telah menemani, memotivasi dan mendoakan penulis.
9. Teman-teman senasib dan seperjuangan Keluarga Ekonomi Islam A-2015 yang telah menemani, saling memotivasi dan mendokan selama 4 tahun ini, semoga selalu diberi kemudahan.
10. Keluarga BMC-2015 atas rasa kekeluargaan, ilmu dan pengalaman berharga selama 4 tahun ini.
11. Keluarga forshei yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan menjadi tempat belajar berorganisasi.
12. Teman-teman kos Bu Khudori khususnya Mb Tya, Sinta dan Janita yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin Yarabbal 'aalamin.*

Semarang, 20 Desember 2019

Penulis,

Aminah

NIM 1505026016

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kemiskinan	13
2.1.1. Definisi Kemiskinan.....	13
2.1.2. Ukuran Kemiskinan.....	14

2.1.3.	Macam-macam Kemiskinan	16
2.1.4.	Penyebab Kemiskinan	16
2.1.5.	Kemiskinan dalam Perspektif Islam	19
2.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28
2.3.	Pengangguran.....	32
2.3.1.	Jenis-jenis Pengangguran	33
2.3.2.	Dampak Pengangguran	35
2.3.3.	Strategi Menanggulangi Pengangguran	36
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	42
2.5.	Hipotesis	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 33

3.1.	Jenis dan Sumber Data	45
3.1.1.	Jenis Data	45
3.1.2.	Sumber Data.....	45
3.2.	Populasi dan Sampel	46
3.2.1.	Populasi.....	46
3.2.2.	Sampel	48
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4.	Variabel Penelitian dan Pengukuran	51
3.5.	Metode Analisis Data.....	53
3.5.1.	Statistik Deskriptif	53
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik	54
1.	Uji Normalitas.....	54
2.	Uji Multikolinearitas	55

3.	Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.	Uji Autokorelasi.....	56
3.5.3.	Pengujian Hipotesis.....	56
1.	Koefisien Determinasi.....	56
2.	Uji F (Simultan)	57
3.	Uji t (Parsial).....	58
3.5.4.	Analisis Regresi	59

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..... 61

4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	61
4.1.1.	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	61
4.1.2.	Profil Kabupaten	63
4.1.3.	Kemiskinan	75
4.1.4.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	77
4.1.5.	Pengangguran.....	78
4.2.	Hasil Penelitian	79
4.2.1.	Statistik Deskriptif	79
4.2.2.	Uji Asumsi Klasik	81
1.	Uji Normalitas.....	81
2.	Uji Multikolinearitas	82
3.	Uji Heteroskedastisitas.....	83
4.	Uji Autokorelasi.....	84
4.2.3.	Pengujian Hipotesis.....	85
1.	Koefisien Determinasi.....	85
2.	Uji F (Simultan)	86

3. Uji t (Parsial).....	86
4.2.4. Analisis Regresi	88
4.3. Pembahasan	90
4.3.1. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan.....	90
4.3.2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Simpulan	92
5.2. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa	5
Tabel 1.2	PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	6
Tabel 1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah	7
Tabel 3.1	Populasi Penelitian	47
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	49
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Miskin Tertinggi 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	76
Tabel 4.2	PDRB 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	78
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	79
Tabel 4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	80
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	81
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi.....	84
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	85
Tabel 4.10	Hasil Uji F	86
Tabel 4.11	Hasil Uji t	87
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	4
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Wonosobo.....	64
Gambar 4.2	Peta Kabupaten Kebumen	65
Gambar 4.3	Peta Kabupaten Rembang.....	66
Gambar 4.4	Peta Kabupaten Brebes	68
Gambar 4.5	Peta Kabupaten Purbalingga.....	70
Gambar 4.6	Peta Kabupaten Pemasang	72
Gambar 4.7	Peta Kabupaten Banjarnegara.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman permasalahan kehidupan manusia pun semakin kompleks tidak terkecuali ekonomi. Semakin beragam kebutuhan manusia semakin beragam pula masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, Islam telah mengatur kegiatan ekonomi manusia agar sesuai dengan tujuan dari syariat. Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat).¹ Kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan. Sehingga pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa agar setiap tahap semakin mendekati tujuan. Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara adalah kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).²

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Islam melarang kepada umatnya

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 4

² M. Alhudori, *Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*, Jurnal of Economics and Business, Vol.1 No.1, Jambi: Universitas Batanghari, 2017, h. 113

untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisaa' (4): 9

وَيَحْشَ الْذِينَ لَو تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunannya yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”
(QS. An-Nisaa': 9)³

Kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mudrajad Kuncoro adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.⁴ Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Sehingga dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah-

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, h. 78

⁴ Anggit Yoga Permana, *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012

masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.⁵

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia dalam kebijakan pembangunan. Sasarannya adalah dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).⁶

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

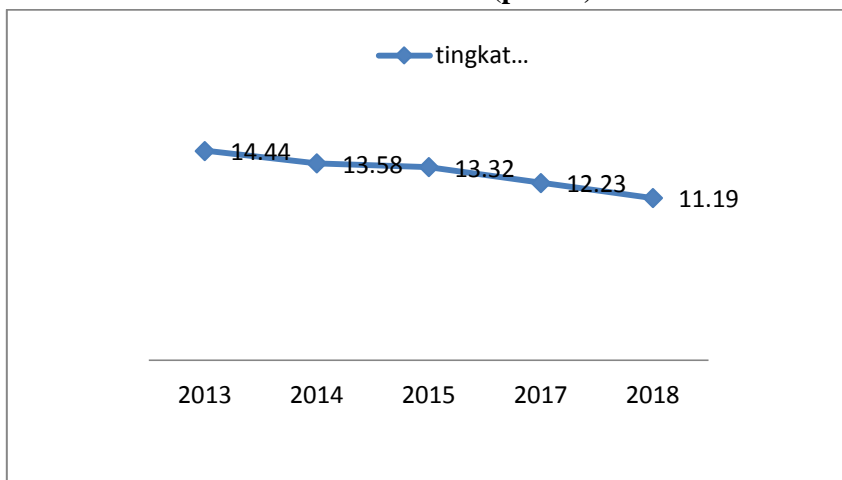
Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Tabel 1.1 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 14,44 persen dan turun menjadi 13,58 persen pada tahun 2014, kemudian turun kembali

⁵ Whisnu Adhi Saputra, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, h. 1

⁶ <https://www.bappenas.go.id/id/>, diakses 10 Agustus 2019

menjadi 13,32 persen di tahun 2015 dan 12,23 persen pada tahun 2017, penurunan terjadi hingga tahun 2018 menjadi 11,19 persen.

Gambar 1.1
Persentase Kemiskinan di Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (persen)



Sumber: *BPS Jawa Tengah, Data Kemiskinan Jawa Tengah*

Keberhasilan provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat kemiskinan enam Provinsi di pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah paling tinggi kedua dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 12,95 persen. Peringkat pertama ditempati oleh Provinsi DIY dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 13,38 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 11,87 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar

8,69 persen. Provinsi Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 5,60 persen menempati posisi kelima dan terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 3,75 persen.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Enam Propinsi di Pulau Jawa
Tahun 2013-2018 (persen)

No	Provinsi	2013	2014	2015	2017	2018	Rata-rata
1	DKI Jakarta	3,72	4,09	3,61	3,78	3,55	3,75
2	Banten	5,89	5,51	5,75	5,59	5,25	5,60
3	Jawa Barat	9,61	9,18	9,57	7,83	7,25	8,69
4	Jawa Timur	12,73	12,28	12,28	11,2	10,85	11,87
5	Jawa Tengah	14,44	13,58	13,32	12,23	11,19	12,95
6	DI Yogyakarta	15,03	14,55	13,16	12,36	11,81	13,38

Sumber : *BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2007-2019*

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah yaitu produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian suatu wilayah. Tetapi, PDRB yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan seluruh penduduk disuatu wilayah.⁷ PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Sehingga semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.⁸ Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah berubah secara fluktuatif. Akan tetapi terus mengalami peningkatan yaitu dari 5,11 persen pada tahun 2013 menjadi 5,32 persen pada tahun 2018.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

Tahun	PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2013	726 655.12	5,11
2014	764 959,15	5,27

⁷Alhudori, *Pengaruh...*, h. 114

⁸ Dhimas Anggara Willy Putra, *Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2013*, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2015

2015	806 765,09	5,47
2017	893 750,44	5,26
2018	941 283,28	5,32

Sumber : *PDRB Jawa Tengah 2018*

Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.⁹ Pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan adanya pengangguran produktivitas masyarakat rendah yang akan menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan angka kemiskinan.

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah
Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2013	1 022 728	6,02
2014	996 344	5,68
2015	863 783	4,99
2017	823 938	4,57
2018	814 347	4,51

Sumber : *Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2019*

⁹ Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, h. 82

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong masih tinggi, tingkat pengangguran di Jawa Tengah mengalami fase penurunan. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran sebesar 6,02 persen atau sebanyak 1.022.728 jiwa, kemudian turun menjadi 996.344 jiwa atau 5,68 persen pada tahun 2014. Penurunan tingkat pengangguran terjadi secara berurutan dari tahun 2015, 2017 hingga tahun 2018, dari 863.783 jiwa atau 4,99 persen di tahun 2015 menjadi 823.938 jiwa atau 4,57 persen di tahun 2017, dan pada tahun 2018 jumlah pengangguran kembali turun menjadi 814.347 jiwa atau 4,51 persen.

Menurut Tambunan (2001) sebagaimana yang dikutip oleh Saputra bahwa tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013-2018 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di pulau Jawa adalah yang paling tinggi kedua.

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhudori (2017) yaitu “Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dimana jika PDRB naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,006. Sedangkan variabel jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,010.¹⁰

Berbeda dengan penelitian Segoro dan Pou (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, pada saat pengangguran mengalami kenaikan maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Secara simultan PDRB, Inflasi, IPM dan Pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.¹¹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari (2017) yaitu “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, Pengangguran dan PDRB

¹⁰Alhudori, *Pengaruh...*, h. 123-124

¹¹ Waseso Segoro dan Muhamad Akbar Pou, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012*, Prosiding SNaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Depok: Universitas Gunadarma, 2016, h. 33-34

secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Sedangkan secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai seberapa besar **“Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab./Kota Termiskin di Jawa Tengah Tahun 2013-2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab./Kota Termiskin di Jawa Tengah?
2. Seberapa besar pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab./Kota Termiskin di Jawa Tengah?

¹² Riana Puji Lestari, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*, Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan, 2017, h. 95

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab./Kota Termiskin di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kab./Kota Termiskin di Jawa Tengah

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik untuk menambah varian kajian mengenai ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan
2. Secara Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang secara garis besar sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran dan kemiskinan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Provinsi Jawa Tengah, profil kabupaten, deskripsi data serta hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Berbagai teori muncul untuk menegaskan penjelasan tentang kemiskinan.

Menurut World Bank, bahwa kemiskinan adalah *"The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other"*.¹³

Dari definisi di atas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Sedangkan menurut Amartya Sen (1987) dalam Houghton dan Khandker bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan-kemampuan dasar, tidak memiliki pendapatan, tidak memperoleh pendidikan yang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki

¹³ <https://www.worldbank.org>, diakses 10 Agustus 2019

kepercayaan diri yang rendah, atau tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara.¹⁴

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.¹⁵ Adapun pendekatan menurut Todaro dan Smith (2012) dalam Beik dan Arsyianti, seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan maupun pengeluarannya berada di bawah nilai uang tertentu.

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai gambaran dari kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan) sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.2. Ukuran Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan absolut dan relatif.

a. Ukuran Kemiskinan Absolut

Merupakan pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori

¹⁴ Jonathan Houghton, Shahidur R. Khandker, *Handbook on Poverty & Inequality*, Terj. Tim Penerjemah World Bank, Pedoman tentang Kemiskinan & Ketimpangan, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 2-3

¹⁵ <https://www.bps.go.id>, diakses 25 Juni 2019

seseorang atau keluarga dalam satuan waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut.

Menurut BPS, ukuran kemiskinan dilihat dari sisi makanan dan non makanan dengan menggunakan konsep garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan dibangun di atas dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKM dihitung dengan pendekatan kalori, dimana standar kebutuhan kalori minimal seseorang adalah setara dengan angka 2.100 kkal per kapita per hari. Adapun GKNM dihitung berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas bukan makanan (termasuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan), yaitu sebanyak 47 komoditas untuk daerah pedesaan dan 51 komoditas untuk daerah perkotaan.¹⁶ Sedangkan ukuran kemiskinan menurut World Bank (2015) adalah USD \$1,90 per orang per hari.¹⁷

b. Ukuran Kemiskinan Relatif

Yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi relatif.

¹⁶ Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 69

¹⁷

<https://document.worldbank.org/curated/en/6647515531005733765/National-Account-Data-Used-in-Global-Poverty-Measurement>, diakses 5 September 2019

2.1.3. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, dimana standar hidup minimal berbeda antar negara.

b. Kemiskinan Relatif

Diartikan sebagai pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan demikian, kemiskinan relatif berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Pada pendekatan ini garis kemiskinan akan berubah seiring dengan perubahan tingkat hidup masyarakat.

c. Kemiskinan Struktural

Yaitu ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.

2.1.4. Penyebab Kemiskinan

Terdapat tiga pendekatan yang mencoba untuk menjelaskan mengenai kemiskinan, yaitu:

a. *System Approach*

Pendekatan ini lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan

demografi.¹⁸ Kondisi demikian lebih banyak dialami oleh penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman. Dalam konteks demikian, pendekatan ini menyarankan adanya intervensi tertentu melalui pengenalan teknologi baru serta membangun dan memperbaiki sarana dan pra sarana transportasi dan komunikasi.

b. *Decision-making Model*

Pendekatan kedua menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian penduduk dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.¹⁹ Dengan kata lain, sebagian penduduk kurang memiliki inovasi atau empati, dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) untuk mengelola unit-unit usaha yang mereka miliki atau kuasai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan ini menghendaki adanya peningkatan kemampuan, yaitu keahlian dan keterampilan SDM.

c. *Structural Approach*

Pendekatan ketiga melihat bahwa penyebab kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilihan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya.²⁰ Hal ini ditunjukkan dengan adanya

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 234

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 235

sebagian penduduk di dalam masyarakat yang jumlahnya lebih kecil tetapi menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi secara dominan. Pendekatan ini menghendaki adanya penerapan kebijaksanaan politik pembangunan yang dapat menghapus ketimpangan.

Menurut Mudrajat Kuncoro bahwa penyebab kemiskinan tersebut akan bermuara pada suatu teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). *Pertama*, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari rendahnya indeks pembangunan manusia. *Kedua*, ketidaksempurnaan pasar, dan *ketiga* kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas selanjutnya akan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima (tercermin dari rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, dan seterusnya.²¹

²¹ Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011

2.1.5. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu konsep multidimensional dan sulit didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu yang mendefinisikannya.

Kemiskinan dalam pandangan Islam sedikit berbeda dengan pandangan konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan dalam dua kategori yaitu fakir dan miskin. Menurut pendapat mazhab Syafii dan Hambali, orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.²² Hal ini didasarkan pada QS. Al-Kahfi (18): 79.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”. (QS. Al-Kahfi: 79)²³

Sedangkan definisi orang fakir menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada sebab khusus yang syar’i (*uzur syar’i*), seperti

²² Beik dan Arsyianti, *Ekonomi...*, h. 72

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran...*, h. 302

usia tua dan sakit-sakitan, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat mencari nafkah.²⁴ Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS. Al-Baqarah: 273)²⁵

Menurut Al Ghazali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan.²⁶ Al Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan ruhani

²⁴ Beik dan Arsyianti, *Ekonomi...*, h. 72

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran...*, h. 46

²⁶ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta:

atau spiritual. Hal ini didukung oleh pendapat Ahmed yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada spiritual dan urusan duniawi.²⁷

Upaya untuk memenuhi kebutuhan seseorang harus bekerja agar bisa menerima pendapatan, bisa bekerja dibidang jasa, produksi ataupun perdagangan serta yang lainnya. Dalam teori ini tidak bisa seseorang hanya berdiam diri saja tanpa berusaha bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Allah memberi rezeki kepada makhluknya melalui perantara yaitu manusia bekerja dalam bidang apapun, rezeki sudah ditetapkan namun tidak datang sendiri tapi melalui perantara yaitu manusia melakukan aktivitas tertentu walaupun hasil setiap orang berbeda sesuai dengan kadar masing-masing.²⁸

2. Bahaya Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Selain itu, Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana agar memohon perlindungan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Warno, *Perspektif Ekonomi dari Sisi Tasawuf Islam*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 4, No. 1, Semarang: STIE Semarang, 2012, h. 51

kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Banyak sahabat Rasulullah Saw. yang meriwayatkan hadist tentang bahaya kemiskinan. Sebagaimana dalam hadits berikut ini :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan”.

(HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah)²⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. berlindung kepada Allah Swt. dari segala hal yang melemahkan baik secara materi maupun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak memiliki uang (kemiskinan), atau tidak memiliki harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan). Bahaya kemiskinan juga dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam hadits lain, bahkan beliau menggambarkan bahwa kefakiran mendekati kekufuran, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

كَأَدَّ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah Saw. bersabda kefakiran mendekati kekufuran”. (HR. Abu Daud)³⁰

²⁹ Huda, *Ekonomi...*, h. 24

³⁰ Arif, *Teori...*, h. 225

Menurut Manawy antara ke fakiran dan kekufuran memiliki kaitan yang sangat erat, karena kekafiran merupakan langkah menuju kekufuran. Seorang yang fakir miskin pada umumnya akan merasa iri dengki kepada orang yang mampu dan kaya sehingga dapat melenyapkan kebaikan. Hal ini dapat menodai agamanya dan timbul ketidakridhaan atas takdir yang akan membuatnya mencela rezeki yang diberikan kepadanya. Walaupun ini semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri.

3. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif syariah, kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan penghasilan merupakan *sunnatullah*. Upaya pengentasan kemiskinan berbicara mengenai bagaimana mengurangi dan meminimalisir kemiskinan sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.

Menurut al-Maududi dalam buku Nurul Huda, karakteristik sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu berusaha dan bekerja, larangan menumpuk harta, zakat, hukum waris, ghanimah dan hemat. Namun konsep tersebut tidak semuanya relevan diterapkan

dimasa sekarang, seperti konsep ghanimah yang sudah tidak ada lagi.³¹

Yusuf Qardhawi dalam penelitiannya menyebutkan beberapa langkah dalam hal pengentasan kemiskinan, antara lain:³²

- a. Menggalakkan kerja dikalangan kaum miskin, dengan memberikan semangat atau memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan etos dan semangat kerjanya
- b. Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, dimana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin
- c. Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu lebih berdayaguna dalam perekonomian
- d. Jaminan dari perbendaharaan negara (baitul maal)
- e. Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan diluar kewajiban zakat untuk kaum muslim
- f. Menganjurkan sedekah yang sifatnya sukarela

Kewajiban menunaikan zakat bagi kaum muslim sebagaimana dalam sebuah hadits sabda Nabi Muhammad Saw berikut ini:

ان الله فرض على اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم ولن يجهد الفقراء اذا

جاعوا او عروا الا بما يصنع اغنياؤهم وان الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا اليما

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah

³¹ Huda, dkk, *Ekonomi...*, h. 25

³² Arif, *Teori...*, h. 245

akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”.³³

Berdasarkan hadits di atas bahwa kewajiban zakat yang telah diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki harta kekayaan untuk diberikan sebagian kepada kaum fakir miskin, dikarenakan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Kewajiban zakat bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi tingkat kemiskinan absolut serta mengatasi permasalahan yang ditimbulkannya. Sehingga tatanan kehidupan masyarakat berkeadilan sosial, sebagai salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam dapat terwujud di masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan sosial termasuk kemiskinan di dalam syariat Islam telah terintegrasi antara sistem yang ada dengan nilai dalam Islam. Sebab dalam Islam, sebagaimana di atas hadits Rasulullah bahwa “kondisi kefakiran dapat menyebabkan seseorang kepada kekafiran”. Sehingga agar masyarakat miskin terbebas dari kekafiran, maka harus disusunlah suatu sistem yang dapat membebaskan mereka dari lingkaran setan kemiskinan, terutama yang diakibatkan oleh ketidakadilan sistem ekonomi yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat sebenarnya adalah suatu sistem yang terintegrasi dalam Islam sebagai salah satu bentuk sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia dan telah ada lebih dahulu daripada sistem jaminan sosial lain.

³³ *Ibid...*, h. 225

Keseluruhan sistem jaminan sosial zakat ini pada mulanya berjalan dengan baik, karena zakat dikelola secara langsung oleh pemerintah yang adil, dimana pendayagunaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu zakat telah berubah menjadi semacam aktivitas kesementaraan (*temporary action*), yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah yaitu satu tahun sekali. Akibatnya pendayagunaan zakat hanya dalam bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat (*temporary relief*) yang diberikan setahun sekali, sehingga tidak akan menjadikan zakat tersebut menjadi salah satu bantuan hidup yang dapat melepaskan mereka dari jurang kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu PDRB dan Pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti (2013), yaitu “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara bersama-sama dipengaruhi secara signifikan oleh variabel PDRB, Pengangguran dan IPM sebesar 99,7 persen. Hal ini berarti bahwa variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Pengangguran dan IPM sebesar 99,7 persen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Sedangkan secara parsial kemiskinan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel PDRB. Dimana kemiskinan akan meningkat sebesar 0.22492 setiap kenaikan PDRB sebesar 1 satuan. Kemiskinan juga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel

pengangguran. Dimana kemiskinan akan meningkat sebesar 0.49863 ketika pengangguran naik sebesar 1 satuan.³⁴

Penelitian lain oleh Segoro dan Pou (2016) berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara simultan dipengaruhi oleh PDRB, Inflasi, IPM dan Pengangguran secara signifikan. Sedangkan secara parsial kemiskinan secara signifikan tidak dipengaruhi oleh PDRB. Dimana kemiskinan akan naik sebesar 0.203 saat PDRB bertambah 1 persen. Selain itu, kemiskinan dipengaruhi pula secara positif dan signifikan oleh variabel pengangguran. Dimana kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.455 setiap penambahan 1 persen pengangguran.³⁵

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Alhudori (2017) yang berjudul “Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh IPM, PDRB dan Pengangguran sebesar 0,531. Variabel jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh IPM, PDRB dan pengangguran sebesar 53,1 %. Sedangkan secara parsial jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pengangguran secara positif. Jumlah penduduk miskin akan naik sebesar

³⁴ Sussy Susanti, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*, Jurnal Matematika Integratif, Vol. 9, No. 1, Bandung: STIE Ekuitas, 2013, h. 12

³⁵ Segoro dan Pou, *Analisis...*, h. 31-32

0,010 ketika pengangguran naik 1 persen. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi secara negatif oleh PDRB. Dimana jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,006 ketika PDRB naik 1 persen.³⁶

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertambahan jumlah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali menjadi ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi.³⁷ Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berperan dalam pembentukan strategi dan perencanaan pembangunan daerah.

Menurut BPS bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.³⁸ PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang

³⁶ Alhudori, *Pengaruh...*, h. 123-124

³⁷ Vighar Choirul Iqbal, *Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2015, h. 7

³⁸ Radityo Yudi Wibisono, *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, h. 23

dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Perhitungan PDRB dapat ditempuh dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tertentu tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan inventori, dan
- 5) Ekspor neto (ekspor neto = ekspor – impor)

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB yaitu jumlah balas jasa yang dapat diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. PDRB juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Berdasarkan ketiga pendekatan di atas akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena pajak tak langsung neto termasuk di dalamnya.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Dalam perekonomian suatu daerah Produk Domestik Regional Bruto memiliki peran dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Berkaitan dengan pengaruh PDRB terhadap kemiskinan sejalan dengan penelitian Wirawan dan Arka (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien regresi PDRB sebesar -0,003 memiliki arti bahwa apabila PDRB per kapita naik Rp. 1,- maka akan mengakibatkan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sebesar 0,003 jiwa.³⁹ Penelitian lain oleh Alhudori (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Jika PDRB naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan turun

³⁹I Made Tony Wirawan dan Sudarsa Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol. 4, No. 5, Bali: Universitas Udayana, 2015, h. 557

sebesar 0,006.⁴⁰ Berbeda dengan penelitian Susanti (2013), hasil penelitian bertentangan dengan teori ekonomi, yakni variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien PDRB sebesar 0,2249. Jika PDRB naik sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.2249.⁴¹ Lain lagi dengan penelitian Segoro dan Pou (2016), variabel PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi PDRB bertanda positif 0.203. Setiap penambahan 1 persen PDRB, maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.203.⁴²

Berdasarkan landasan teori dan diperkuat oleh penelitian terdahulu di atas maka diperoleh hipotesis bahwa :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah.

2.3. Pengangguran

Salah satu aspek untuk mengukur kinerja perekonomian adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui di beberapa negara setiap tahun ada penambahan angkatan kerja baru dan tidak sedikit dari mereka yang menganggur bahkan secara kumulatif dari tahun ke tahun jumlah yang menanggur semakin besar.

⁴⁰ Alhudori, *Pengaruh...*, h. 120

⁴¹ Susanti, *Pengaruh...*, h. 12

⁴² Segoro dan Pou, *Analisis...*, h. 31

Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah sosial yang mendasar. Lapangan pekerjaan tidak terbuka luas dan banyak orang sulit mencari pekerjaan. Para penganggur mengalami penurunan standar hidup, tekanan pribadi, dan sering kali kehilangan kesempatan untuk mengembangkan karier mereka.

Menurut standar internasional pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang sudah dikategorikan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.⁴³

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dengan persen.

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

2.3.1. Jenis-jenis Pengangguraan

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran terbagi menjadi empat jenis yaitu⁴⁴:

- a. Pengangguran friksional atau transisi (*frictional or transitional unemployment*) adalah jenis pengangguran yang timbul akibat perubahan di dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Dengan kata lain, pengangguran friksional adalah pengangguran

⁴³ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 249

⁴⁴ *Ibid*, h. 250

yang terjadi sebagai hasil dari pergerakan individu antara bekerja dan mencari pekerjaan baru.

- b. Pengangguran struktural (*strustural unemployment*) merupakan pengangguran yang timbul akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Salah satu faktor penyebab pengangguran struktural adalah adanya kemajuan teknologi (*technology progress*).
- c. Pengangguran alamiah (*natural unemployment*) yaitu tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh.
- d. Pengangguran konjungtur atau siklis (*cyclical unemployment*) adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat (*agregat effective demand*) didalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat.

Berdasarkan cirinya, pengangguran terbagi menjadi empat macam, yaitu⁴⁵:

- a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran yang terjadi karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan lowongan pekerjaan yang mengakibatkan dalam perekonomian semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

⁴⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 201-203

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran yang terjadi akibat jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada saat musim tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan pekerjaannya. Misalnya saat musim hujan para penyadap karet tidak dapat melakukan pekerjaannya karena getah karet akan terbawa air hujan. Pada musim kemarau para petani tidak dapat menggarap lahan sawahnya karena suplai air tidak ada.

d. Setengah Menganggur

Merupakan pengangguran yang disebabkan karena seseorang yang pindah dari desa ke kota sehingga tidak mudah untuk mencari pekerjaan dan terpaksa menganggur sementara waktu atau seseorang yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu.

2.3.2. Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak atau akibat buruk, baik bagi perekonomian maupun individu dan masyarakat⁴⁶:

⁴⁶ Nanga, *Makro...*, h. 254-255

- a. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
 - 1) Masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya
 - 2) Pendapatan pajak berkurang
 - 3) Pengangguran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi
- b. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat
 - 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan
 - 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya keterampilan
 - 3) Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik

2.3.3. Strategi Menanggulangi Pengangguran

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian setiap warga negara yang menganggur berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi pengangguran melalui strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian

fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal serta dapat bersaing dibidangnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

- b. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi penganggur diberbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, seperti hasil-hasil laut, hutan, perkebunan, hasil-hasil tambang maupun potensi sumber daya manusia yang sangat melimpah walaupun sebagian besar merupakan *unskilled labor*.
- c. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek). Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus.
- d. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi

baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja dapat menampung semua angkatan kerja.

- e. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergalih potensinya) dengan melakukan promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja setempat.
- f. Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
- g. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan

difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- h. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
- i. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan sekolah/ perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
- j. Memperbarui dan memperbanyak sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) tetapi juga harus diimbangi dengan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah tersebut, khususnya berupa alat-alat keterampilan/laboratorium. Dengan adanya alat-alat keterampilan ini diharapkan para siswa SMK menjadi ahli dan siap memasuki dunia kerja nanti kalau mereka sudah lulus.
- k. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan

profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

- l. Menggalakkan kembali program transmigrasi yang sempat terhenti karena para penyelenggara negara kita sibuk berurusan dengan politik. Dengan program transmigrasi ini para transmigran yang berasal dari Jawa dan Bali itu diberi sawah agar dapat diolah sehingga dapat memberikan penghasilan kepada mereka.
- m. Mengembangkan potensi pedesaan (kira-kira 44% penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan pada tahun 2015) agar tidak terlalu ketinggalan jauh dengan daerah perkotaan, padahal 80% wilayah (daratan) Indonesia adalah daerah pedesaan. Perlu pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi di daerah pedesaan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, listrik, telepon, serta mendirikan pusat-pusat keterampilan, keahlian, perbengkelan, pertukangan, kerajinan kecil dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan penduduk dan menyerap tenaga kerja di desa-desa sehingga mereka tidak perlu berurbanisasi ke kota-kota.⁴⁷

Selain PDRB, variabel lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dimana setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 satuan,

⁴⁷ Halim, *Teori...*, h. 85-86

kemiskinan akan meningkat sebesar 0.4986.⁴⁸ Begitu pula dalam penelitian Wirawan dan Arka (2015). Dalam penelitian tersebut tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013. Ketika tingkat pengangguran naik 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali 2007-2013 sebesar 1627,066 jiwa.⁴⁹ Penelitian lain oleh Segoro dan Pou (2016) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Setiap penambahan 1 persen pengangguran, maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.455.⁵⁰ Dalam penelitian Alhudori (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin. Jika jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,010.⁵¹ Selain itu, dalam penelitian Ningrum (2017) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dimana setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,073014 persen dan sebaliknya.⁵² Sedangkan penelitian Kuncoro (2014) menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien tingkat pengangguran sebesar -0,165560 yang berarti bahwa

⁴⁸ Susanti, *Pengaruh...*, h. 12

⁴⁹ Wirawawan & Arka, *Analisis...*, h. 557

⁵⁰ Segoro dan Pou, *Analisis...*, h. 32

⁵¹ Alhudori, *Pengaruh...*, h. 121

⁵² Ningrum, *Analisis...*, h. 189

setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,165560 persen dan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi yakni pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.⁵³

Berdasarkan landasan teori dan diperkuat oleh penelitian terdahulu mengenai pengangguran maka diperoleh hipotesis bahwa :

2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel pembangunan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat pengangguran. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan.

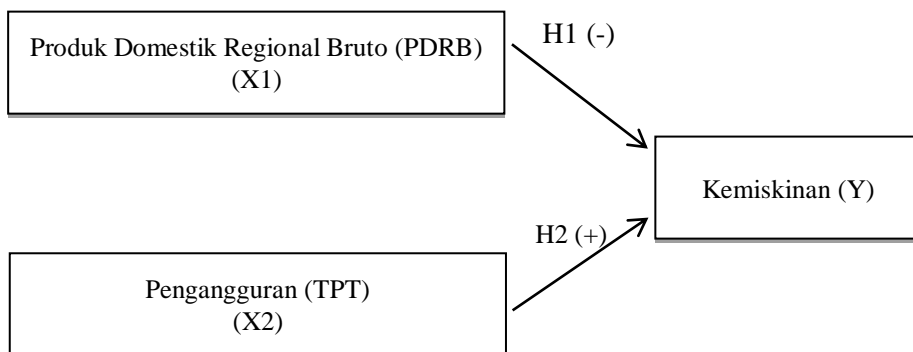
Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat, apabila suatu masyarakat telah bekerja tentu masyarakat tersebut meningkat tingkat kesejahteraannya, tetapi di dalam masyarakat terdapat pula orang yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis

⁵³Sri Kuncoro, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011*, Naskah Publikasi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

dapat mengurangi tingkat kesejahteraan seseorang yang berpengaruh pula pada tingkat kemiskinan. Dampak dari pengangguran adalah pengurangan pendapatan masyarakat yang menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Kedua variabel tersebut digambarkan dalam gambar kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Menurut Karlinger (2002) dalam Sinambela menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang dirumuskan yang akan diuji kebenarannya melalui data empirik yang diperoleh.⁵⁴ Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

⁵⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 55

- H0 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah
- H1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah
- H0 = Pengangguran tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah
- H2 = Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Jenis data diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun jenis data menurut dimensi waktu digolongkan menjadi data runtut waktu (*time-series*), data silang tempat (*cross-section*) dan data panel (*pooling*).⁵⁵

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data panel, yaitu kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Jumlah data silang tempat terdiri atas 7 kabupaten termiskin di Jawa Tengah (Wonosobo, Kebumen, Rembang, Brebes, Purbalingga, Pemalang, dan Banjarnegara). Sedangkan data runtut waktu yang diteliti selama 5 tahun (2013-2018, tahun 2016 tidak dimasukkan dalam data penelitian karena ada data yang tidak lengkap), maka jumlah observasi yang dimiliki sebanyak 35 (7 kali 5).

3.1.2. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari data internal (berasal dari dalam organisasi) atau eksternal (berasal dari luar organisasi) yang terdiri atas

⁵⁵ Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kelima, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018, h. 22-25

data primer data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan untuk memperoleh data.⁵⁶ Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁷

Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan oleh badan atau lembaga pemerintah melalui website-website resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota dari tahun 2013-2018. Populasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*, h. 25

⁵⁷ Sinambela, *Metodologi...*, h. 13

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 80

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Cilacap
2.	Kab. Banyumas
3.	Kab. Purbalingga
4.	Kab. Banjarnegara
5.	Kab. Kebumen
6.	Kab. Purworejo
7.	Kab. Wonosobo
8.	Kab. Magelang
9.	Kab. Boyolali
10.	Kab. Klaten
11.	Kab. Sukoharjo
12.	Kab. Wonogiri
13.	Kab. Karanganyar
14.	Kab. Sragen
15.	Kab. Grobogan
16.	Kab. Blora
17.	Kab. Rembang
18.	Kab. Pati
19.	Kab. Kudus
20.	Kab. Jepara
21.	Kab. Demak
22.	Kab. Semarang
23.	Kab. Temanggung
24.	Kab. Kendal
25.	Kab. Batang
26.	Kab. Pekalongan
27.	Kab. Pemalang
28.	Kab. Tegal
29.	Kab. Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang

34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

Sumber : <https://jatengprov.bps.go.id>

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁵⁹ Dalam penelitian ini sampel yang dipilih menggunakan teknik *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang ada serta sesuai dengan tujuan dari penelitian. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berikut ini⁶⁰:

1. Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2013-2018
2. Memiliki data yang dibutuhkan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode 2013-2018
3. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

⁵⁹*Ibid*, h. 81

⁶⁰ Warno, *Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Tahun 2013*, Jurnal *Economica*, Vol. V, Edisi 1, Semarang : UIN Walisongo, 2014, h. 152

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, dari 15 kabupaten tersebut hanya 7 kabupaten yang digunakan sebagai sampel penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut adalah data sampel penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Wonosobo
2.	Kab. Kebumen
3.	Kab. Rembang
4.	Kab. Brebes
5.	Kab. Purbalingga
6.	Kab. Pemalang
7.	Kab. Banjarnegara

Sumber : <https://jatengprov.bps.go.id>

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁶¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Study pustaka (*library study*)

Penulis berusaha mengumpulkan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan membaca literatur atau buku di perpustakaan.⁶² Menurut (2013) menyebutkan sumber pustaka lain adalah jurnal ilmiah, makalah seminar dan karya ilmiah berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, serta disertasi atau karya tulis lain yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.⁶³

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan, fakta dan data. Sehingga data-data dapat dikumpulkan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.⁶⁴ Data yang diperoleh dari pihak lain (yang berkaitan), data tersebut berdasarkan data statistik kemiskinan, PDRB dan pengangguran

⁶¹ *Ibid*, h. 137

⁶² Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015, h.50

⁶³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 47-48

⁶⁴ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, h. 23

yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013-2018.

c. *Internet research*

Penulis memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan menggunakan internet sebagai salah satu sarana untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan penelitian.

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Berdasarkan hubungannya, penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) (X)

Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain.⁶⁶ Variabel independen juga disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel PDRB (X1) dan Pengangguran (X2).

⁶⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 39

⁶⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Suluh Media, 2018, h. 53

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel independen.⁶⁷ Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan (Y).

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Pengukuran	Sumber
Kemiskinan	ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran	- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) - Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)	Dinyatakan dalam satuan persen	Website BPS
PDRB	Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kabupaten/kota dalam kurun	PDRB atas dasar harga konstan	Dinyatakan dalam satuan miliar rupiah	Website BPS

⁶⁷*Ibid*, h. 54

	waktu satu tahun			
Pengangguran	Persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak mempunyai mata pencaharian dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) - Sedang mencari pekerjaan - Belum memiliki pekerjaan 	Dinyatakan dalam satuan persen	Website BPS

3.5. Metode Analisis Data

Model dalam penelitian ini adalah model hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Metode analisis data menggunakan *software IBM SPSS Statistics 21*.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis deskriptif sangat membantu dalam meringkas perbandingan beberapa variabel data skala dalam satu tabel dan dapat digunakan untuk melakukan

pengamatan outlier data. Selain itu bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan dari data yang diolah.⁶⁸

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi linier disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.⁶⁹

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak.⁷⁰ Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari nilai sampel sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, dalam hal adalah data berdistribusi normal. Uji *Kolmogorov-Smirnov* biasanya digunakan untuk menguji normalitas data berskala interval dan rasio. Dasar pengambilan keputusan diambil dari nilai signifikansi

⁶⁸ Warno, *Kepatuhan...*, h. 153

⁶⁹ Duwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017, hlm. 107

⁷⁰ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 223

Kolmogorov-Smirnov. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$.⁷¹

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.⁷² Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada umumnya dengan melihat nilai *Variance Inflation Faactor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas.⁷³ Heteroskedastisitas biasanya muncul pada data *cross section* dan jarang terjadi pada *time*

⁷¹ Sarwono, Statistik..., h. 27

⁷² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 105

⁷³ Zumrotun Nafiah dan Warno, *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 10 No. 1, Semarang: STIE Semarang, 2018, h. 98

series (deret waktu).⁷⁴ Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi residual lebih besar dari 0,05 maka dapat dipastikan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi antar *error term* untuk periode yang berbeda atau korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*, artinya kondisi sekarang (periode t) dipengaruhi waktu lalu ($t-1$).⁷⁵ Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW Test). Ketentuan autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson* antara lain:

- a. Jika $d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif
- b. Jika $d > dl$, maka terjadi autokorelasi negatif
- c. Jika $du < d < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi
- d. Jika $dl < d < 4-dl$, maka tidak dapat disimpulkan

3.5.3. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur

⁷⁴ Mahyus Ekananda, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, Edis Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 111

⁷⁵ Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 168

kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang menunjukkan bagaimana kemampuan dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.⁷⁶ Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Jika $R^2=1$ berarti 100 persen total variasi variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sedangkan, jika $R^2=0$ berarti tidak ada variasi variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Ini berarti jika R^2 besar, maka nilai e semakin kecil. Dengan demikian semakin besar nilai R^2 dari model yang dibuat, maka semakin baik dan sesuai dengan modelnya.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁷⁷ Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Langkah-langkah uji F untuk mengetahui apakah koefisien regresi di dalam persamaan regresi berganda secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)
- b. Membuat rumusan hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

⁷⁶Sri Mulyono, *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ed. 4, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, h. 112

⁷⁷ Riyanto & Uka Wikarya, *Statistika Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, h.178

Ho : variabel PDRB dan pengangguran secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Ha : variabel PDRB dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

c. Mencari F hitung dan nilai F tabel dari tabel distribusi F

d. Keputusan menerima atau menolak Ho sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka Ho ditolak

Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka Ho diterima

Ketika Ho ditolak, berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel dependen. Sebaliknya, jika Ho diterima berarti variabel independen secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.⁷⁸

3. Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel independen secara parsial. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).⁷⁹

Langkah langkah hipotesis dalam uji t sebagai berikut:

a. Rumusan hipotesis, yaitu Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif (Ha)

⁷⁸ Agus Widarjono, *Analisis Statistika Multivariat Terapan. Dilengkapi dengan SPSS Amos*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010, h. 24

⁷⁹*Ibid.* h.28

- b. Mencari nilai t hitung dan t nilai t tabel dari tabel distribusi t
- c. Membandingkan nilai statistik t hitung dan t kritisnya. Keputusan untuk menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

Ketika H_0 ditolak artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika H_0 diterima berarti variabel independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4. Analisis Regresi

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel independen (bebas) yang digunakan. Penerapan metode regresi linier berganda jumlah variabel independen (bebas) yang digunakan

lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel dependen (terikat).⁸⁰

Model regresi linier berganda dengan dua variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y	: Kemiskinan
X ₁	: PDRB
X ₂	: TPT
a	: Konstanta
b ₁	: Koefisien regresi PDRB
b ₂	: Koefisien regresi TPT
e	: <i>error term</i>

⁸⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h. 301

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950.⁸¹

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.” Sedangkan Misi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.⁸²

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan

⁸¹ <https://jatengprov.go.id/sejarah/>, diakses 27 November 2019

⁸² <https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 27 November 2019

Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia).⁸³

Berdasarkan posisi geografisnya, Jawa Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.⁸⁴

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Wilayah tersebut terdiri dari 576 kecamatan dan 8.559 desa/kelurahan. Kabupaten/kota tersebut merupakan populasi dalam penelitian ini. Namun, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 kabupaten yang memenuhi kriteria tertentu.

⁸³ <https://jatengprov.go.id/sejarah/>, diakses 27 November 2019

⁸⁴ BPS, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka* 2018, h. 3

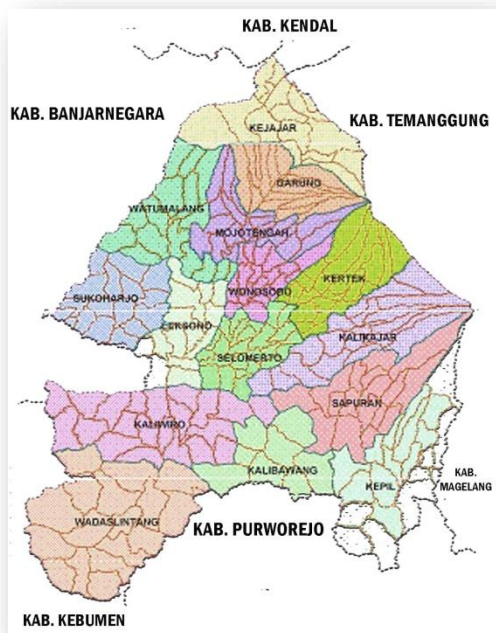
4.1.2. Profil Kabupaten

1. Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo berdiri pada tanggal 24 Juli 1825. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 7°11'20" sampai 7°36'24" garis Lintang Selatan (LS), serta 109°44'08" sampai 110°04'32" garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar (984,68 km²) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut secara administrasi terbagi menjadi 15 kecamatan.

Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibu kota Jawa Tengah (Semarang). Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah berupa dataran tinggi yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Selain itu juga menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu – Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju jalur strategis nasional tersebut.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Wonosobo



Sumber : <https://www.google.com/>

Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara.⁸⁵

⁸⁵ <http://dashboard-smartcity.wonosobokab.go.id/p/4-kondisi-geografis>, diakses 28 November 2019

2. Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen terletak $7^{\circ}27'$ - $7^{\circ}27'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}33'$ - $109^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di timur, Kabupaten Banjarnegara di utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di barat, dan Samudera Indonesia di bagian selatan.

Gambar 4.2
Peta Kabupaten Kebumen



Sumber : <https://www.google.com/>

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.218,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah

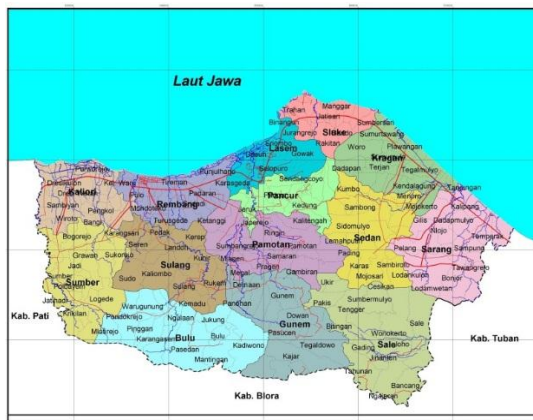
merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.⁸⁶

Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748,00 hektar atau sekitar 31,03% merupakan lahan sawah dan 88.363,50 hektar atau 68,97% lahan kering.

Iklim di Kabupaten Kebumen tercatat curah hujan selama tahun 2013 sebesar 3,787,00 mm dan hari hujan sebanyak 188 hari. Suhu terendah sekitar 20,60°C dan tertinggi 34,00°C. Rata-rata kelembaban udara setahun 81,00% dan rata-rata kecepatan angin 0,23 m/detik.⁸⁷

3. Kabupaten Rembang

Gambar 4.3
Peta Kabupaten Rembang



Sumber : <https://www.google.com/>

⁸⁶ <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/21>, diakses 28 November 2019

⁸⁷ <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>, diakses 16 Desember 2019

Kabupaten Rembang yang ber-semboyan: BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa). Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat.

Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (jalur Pantura), pada garis koordinat 111⁰00'-111⁰30' Bujur Timur dan 6⁰30'-7⁰6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang). Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65%). Lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38%) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar

32,94%, hutan 23,45% dan sawah tadah hujan sebesar 20,08%.

Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang mewakili luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha).⁸⁸

4. Kabupaten Brebes

Gambar 4.4
Peta Kabupaten Brebes



Sumber : <https://www.google.com/>

Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108°41'7" - 109°11'28",92 Bujur Timur dan 7°44'56"5" - 7°20'51,48

⁸⁸ <https://rembangkab.go.id/geografis/>, diakses 29 November 2019

Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Ibukota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan “menyatu”.

Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian Barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.

Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.⁸⁹

5. Kabupaten Purbalingga

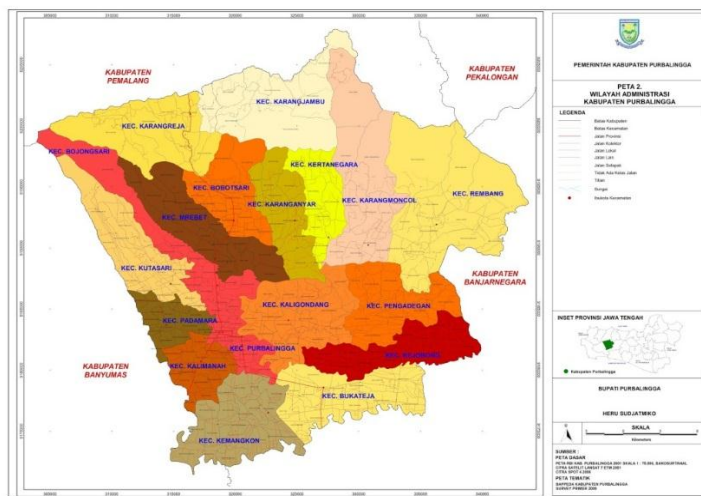
Kabupaten Purbalingga berdiri pada 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1246 Hijriyah atau 3 Rajab 1758 Je berdasarkan Peraturan daerah (perda) No. 15 Tahun 1996 tanggal 19 Desember 1996.⁹⁰

⁸⁹<http://www.brebeskab.go.id/index.php/profil-daerah/sejarah>, diakses 28 November 2019

⁹⁰<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/sejarah/>, diakses 28 November 2019

Kabupaten Purbalingga terletak diantara $109^{\circ} 11' \text{ BT} - 109^{\circ} 35' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 10' \text{ LS} - 7^{\circ} 29' \text{ LS}$. Kabupaten Purbalingga memiliki luas daerah sebesar 77.764,122 ha / 777,64 Km². Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beraneka ragam, meliputi dataran rendah di daerah selatan, perbukitan dan karang gunung di daerah utara.⁹¹ Berdasarkan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan.⁹²

Gambar 4.5
Peta Kabupaten Purbalingga



Sumber : <https://www.google.com/>

⁹¹<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/topografi/>, diakses 28 November 2019

⁹²<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/pembagian-wilayah-administrasi/>, diakses 28 November 2019

Jarak kota Purbalingga dari ibukota Provinsi Jawa Tengah yakni Semarang adalah 191 km. Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan dengan Kabupaten Pemalang di utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas di sebelah selatan.⁹³

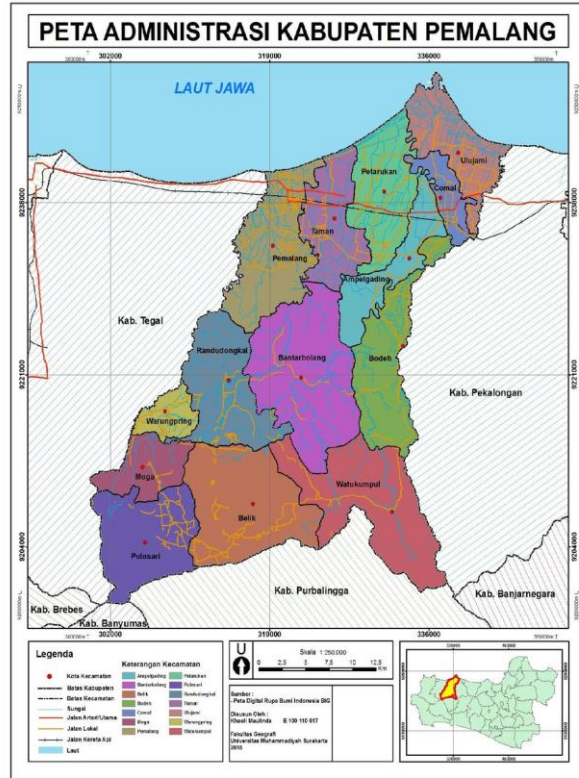
6. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30" – 70 20' 11" LS. Jarak dengan ibukota Jawa Tengah (Semarang) kira-kira 135 km. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

⁹³

<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/gambaran-wilayah-purbalingga/>, diakses 28 November 2019

Gambar 4.6
Peta Kabupaten Pemalang



Sumber : <https://www.google.com/>

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 mdpl. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 mdpl dan bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 mdpl. Wilayah

Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Secara administrasi Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang.⁹⁴

7. Kabupaten Banjarnegara

Gambar 4.5
Peta Kabupaten Banjarnegara



Sumber : <https://www.google.com/>

Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas wilayah 1.064,52 km² terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan

⁹⁴ <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>, diakses pada 16 Desember 2019

dan 266 desa. Terletak antara 712' - 731' LS dan 231' - 308' BT.⁹⁵

Kabupaten Banjarnegara di bagian utara merupakan daerah pegunungan dengan relief bergelombang dan curam, sementara bagian tengah adalah wilayah dengan relief datar merupakan lembah sungai serayu yang subur, dan bagian selatan adalah wilayah dengan relief curam yang merupakan bagian dari pegunungan.⁹⁶

Ketinggian tempat pada masing-masing wilayah umumnya tidak sama yaitu antara 40-2.300 meter dpl dengan perincian kurang dari 100 meter (9,82%), antara 100-500 meter (28,74%) dan lebih dari 1000 (24,40%). Menurut kemiringan tanahnya maka 24,61% dari luas wilayah mempunyai kemiringan 0-15% dan 45,04% dari luas wilayah mempunyai kemiringan antara 15-40% sedangkan yang 30,35% dari luas wilayahnya mempunyai kemiringan lebih dari 40%.

Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%) berbentuk pegunungan dan perbukitan, terdapat sungai yang besar yaitu Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya: Kali Tilis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat

⁹⁵ <https://banjarnegarakab.go.id/website/pemerintahan/letak-geografis/>, diakses 16 Desember 2019

⁹⁶ <https://banjarnegarakab.go.id/website/pemerintahan/gambaran-umum/>, diakses 16 Desember 2019

mengairi areal sawah seluas 9.813,88 hektar, rata-rata bulan basah pada umumnya lebih banyak dari bulan kering dengan curah hujan rata-rata 3.000 milimeter/tahun, sedangkan temperatur daerah rata-rata 20-26 C.⁹⁷

Jenis tanah di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas tanah latosol (66,25%), tanah grumosol (11,72%), tanah andosol (14,5%) dan jenis tanah lainnya (7,53%).

4.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang masih terjadi hingga kini. Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu produk domestik regional bruto dan tingkat pengangguran. Minimnya jumlah masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan, buta huruf dan tidak memiliki keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berkarya, tidak produktif dan bergantung kepada orang lain sehingga mereka tidak mampu menghasilkan pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga mereka hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh

⁹⁷ <https://banjarnegarakab.go.id/website/pemerintahan/letak-geografis/>, diakses 16 Desember 2019

pemerintah dan swasta sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran karena kenaikan jumlah pencari kerja.

Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kekurangan ekonomi tetapi keterbatasan memperoleh pilihan-pilihan dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat memilih bergaul dengan kelompok yang memiliki derajat dan status sosial yang sama. Sehingga sebagian kecil masyarakat merasa terasingkan yang menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini lebih jelas terlihat di daerah perkotaan dimana si kaya semakin kaya dan di miskin semakin terasingkan di pinggir kota. Sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya 7 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Berikut ini akan disajikan data rata-rata kemiskinan tertinggi 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun yaitu 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Miskin Tertinggi 7 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam satuan
persen)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2017	2018	Rata-rata
1	Wonosobo	22,08	21,42	21,45	20,32	17,58	20,57
2	Kebumen	21,32	20,50	20,44	19,6	17,47	19,87
3	Rembang	20,97	19,50	19,28	18,35	15,41	18,70
4	Brebes	20,82	20,00	19,79	19,14	17,17	19,38

5	Purbalingga	20,53	19,75	19,70	18,80	15,62	18,88
6	Pemalang	19,27	18,44	18,30	17,37	16,04	17,88
7	Banjarnegara	18,71	17,77	18,37	17,21	15,46	17,50

Sumber : *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*

4.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Aktivitas ekonomi dalam PDRB meliputi pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan jasa. PDRB merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan potensi dan peran ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dihitung atas dasar harga konstan dan harga berlaku, akan tetapi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilainya akan lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh tekanan inflasi dan kondisi ekonomi yang sedang terjadi.

Berikut ini akan disajikan data PDRB atas dasar harga konstan 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel 4.2
PDRB 7 Kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam miliar
rupiah)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2017	2018	Rata-rata
1	Wonosobo	10333,76	10828,17	11334,08	12405,05	13017,63	11583,738
2	Kebumen	14333,33	15163,09	16115,55	17792,47	18773,83	16435,654
3	Rembang	9780,75	10284,27	10850,27	12138,57	12855,23	11181,818
4	Brebes	23812,06	25074,17	26572,83	29527,03	31094,9	27216,198
5	Purbalingga	12778,31	13397,71	14130,61	15612,29	16458,71	14475,526
6	Pemalang	13172,06	13898,67	14673,7	16343,95	17286,7	15075,016
7	Banjarnegara	11043,08	11629,85	12266,05	13663,27	14438,15	12608,08

Sumber : *BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*

4.1.5. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah dikategorikan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang didinginkannya.⁹⁸ Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang memiliki hubungan yang erat dengan laju pertumbuhan ekonomi.

⁹⁸ Nanga, *Makro...*, h. 249

Berikut ini akan disajikan data rata-rata tingkat pengangguran terbuka 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tingkat Pengangguran Terbuka 7 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam
satuan persen)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2017	2018	Rata-rata
1	Wonosobo	5,82	5,34	4,47	4,18	3,44	4,65
2	Kebumen	3,52	3,25	4,14	5,58	5,52	4,40
3	Rembang	5,97	5,23	4,51	3,19	2,87	4,35
4	Brebes	9,61	9,53	6,49	8,04	7,27	8,19
5	Purbalingga	5,63	5,13	4,84	5,33	6,06	5,40
6	Pemalang	6,48	7,44	6,53	5,59	6,21	6,45
7	Banjarnegara	4,16	4,06	5,05	4,72	4,00	4,40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Berbagai Tahun

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu pengujian statistik dimana pengujian ini bertujuan untuk melihat distribusi data variabel yang digunakan dalam penelitian. Statististik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	35	21314,15	9780,75	31094,90	15510,8614	5422,14999
TPT	35	6,74	2,87	9,61	5,4057	1,61870
Kemiskinan	35	6,67	15,41	22,08	18,9700	1,78381
Valid N (listwise)	35					

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Hasil dari analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2018 rata-rata PDRB sebesar 15510,8614, PDRB tertinggi sebesar 31094,90 dan PDRB terendah 9780,75, range sebesar 21314,15 sedangkan untuk standar deviasi sebesar 5422,14999.

Sementara TPT periode 2013-2018 nilai rata-rata TPT sebesar 5,4057 dan nilai tertinggi sebesar 9,61 dan nilai terendah sebesar 2,87 nilai range sebesar 6,74, sedangkan untuk standar deviasi sebesar 1,61870.

Kemiskinan pada periode 2013-2018 rata-rata sebesar 18,9700 dan nilai tertinggi sebesar 22,08 dan nilai terendah sebesar 15,41, nilai range sebesar 6,67 dan standar deviasi sebesar 1,78381.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat apada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,69731752
	Absolute	,076
Most Extreme Differences	Positive	,068
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,453
Asymp. Sig. (2-tailed)		,987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Hasil uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov Smirnov* di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar

0,987. Hal ini berarti bahwa data yang nantinya akan diuji merupakan data yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada umumnya dengan melihat nilai *Variance Inflation Faactor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	Coefficients		Coefficients					
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	18,631	1,080		17,244	,000		
	PDRB	,000	,000	-,364	-1,648	,109	,581	1,720
	TPT	,406	,243	,368	1,670	,105	,581	1,720

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Hasil uji multikolinearitas di atas diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari variabel PDRB dan TPT adalah 0,581 dan nilai VIF sebesar 1,720. Berdasarkan nilai tersebut berarti bahwa nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10

sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi residual lebih besar dari 0,05 maka dapat dipastikan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	1	(Constant)	1,957			,592
	PDRB	2,358E-005	,000	,134	,593	,557
	TPT	-,174	,133	-,295	-1,307	,201

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari tiap variabel yaitu laju PDRB sebesar 0,557 dan variabel TPT sebesar 0,201. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi, maka digunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria:

- a. Jika $d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif
- b. Jika $d > dl$, maka terjadi autokorelasi negatif
- c. Jika $du < d < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi
- d. Jika $dl < d < 4-dl$, maka tidak dapat disimpulkan

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,481 ^a	,231	,182	1,51561	2,019

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Tabel diatas menunjukkan nilai Durbin Watson (d) sebesar 2,019 dengan 2 variabel bebas dan jumlah pengamatan (N) 34, maka diperoleh nilai tabel $dl = 1,3325$ serta $du = 1,5805$, $4-du = 2,4195$ dan $4-dl = 2,6675$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai $du < d < 4-du$ ($1,5805 < 2,019 < 2,4195$). Nilai d berada diantara du dan $4-du$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase variasi perubahan variabel dependent (Y) yang disebabkan oleh variabel independent (X). Jika semakin besar, maka prosentase perubahan variabel independent (X) semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya.⁹⁹ Hasil dari uji nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,481 ^a	,231	,182	1,51561

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Berdasarkan tabel output diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,231 atau 23,1%, jadi dapat disimpulkan bahwa 23,1% tingkat kemiskinan disebabkan oleh PRDB dan TPT. Sedangkan sisanya yaitu 76,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

⁹⁹ Warno , *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU, Vol. 10 No. 1, Jepara: UNISNU, 2013, h. 34

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian hipotesis uji F.

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,443	2	10,721	4,667	,017 ^b
	Residual	71,209	31	2,297		
	Total	92,652	33			

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

Sumber: Hasil Output IBM SPSS, 2019

Rumus F tabel = $F(k;n-k) = F(2;34-2) = F(2;32) = 3,29$. Berdasarkan uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung $4,667 > F$ tabel 3,29 dan nilai probabilitas 0,017 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, berarti variabel PDRB (X1) dan TPT (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

3. Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen, yaitu PDRB (X1) dan TPT (X2) terhadap kemiskinan (Y). Uji t diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.	
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	10,066524	,680		14,811	,000
1	Lag_X1	-,000200	,000	-,495	-2,565	,015
	Lag_X2	,666130	,235	,547	2,837	,008

a. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber: Hasil Output IBM SPSS, 2019

1. H0: PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah

H1: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah

Pada tabel 4.11 diketahui bahwa dari hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung -2,565, jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,039, maka nilai t hitung $-2,565 < t$ tabel 2,039, dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah (H1) diterima.

2. H0: TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah
H2: TPT berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah

Pada tabel 4.11 diketahui bahwa dari hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung 2,837, jika dibandingkan dengan nilai t tabel 2,039 maka $t \text{ hitung } 2,837 > t \text{ tabel } 2,039$ dengan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah (H2) diterima.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10,066524	,680		14,811	,000
	Lag_X1	-,000200	,000	-,495	-2,565	,015
	Lag_X2	,666130	,235	,547	2,837	,008

a. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : Hasil Output IBM SPSS, 2019

Hasil uji regresi linier di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 10,066524 - 0,000200 X_1 + 0,666130 X_2 + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda yaitu:

1. Konstanta sebesar 10,066524 artinya jika PDRB (X₁) dan TPT (X₂) nilainya 0, maka tingkat kemiskinan (Y) nilainya positif yaitu sebesar 10,066524 persen.
2. Koefisien regresi variabel PDRB (X₁) sebesar -0,000200 berarti bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jika PDRB naik satu miliar rupiah maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,000200 persen dan sebaliknya.

3. Koefisien regresi variabel TPT (X_2) sebesar 0,666130 berarti variabel TPT memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya jika TPT naik satu persen maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,666130 persen dan sebaliknya.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel PDRB dari hasil pengujian t menunjukkan nilai t hitung $-2,565 < t$ tabel 2,039 dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Syahrullah (2014) yakni PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari peningkatan PDRB dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Meningkatnya kesejahteraan rakyat berarti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putra (2015) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB tidak begitu memberikan dampak

terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata pada masyarakat miskin.

4.3.2. Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel TPT dari hasil pengujian t menunjukkan nilai t hitung $2,837 > t$ tabel $2,039$ dengan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Segoro dan Pou (2016) dan Iqbal (2015) bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, pada saat pengangguran mengalami kenaikan maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dampak dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan seseorang. Turunnya kesejahteraan seseorang karena menganggur, tentunya akan meningkatkan peluang untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Susanti (2013) juga menunjukkan hasil yang sama dimana pengangguran mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Begitu juga penelitian Wirawan dan Arka (2015) serta Ningrum (2017) dimana tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh PDRB dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada kab/kota termiskin di Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah. Hal ini dilihat dari nilai t hitung yang diperoleh sebesar $-2,565$ lebih kecil dari t tabel yaitu $2,039$. Besar pengaruh adalah $-0,000200$ dengan tingkat signifikansi $0,015$.
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kab./kota termiskin di Jawa Tengah. Hal ini dilihat dari nilai t hitung yang diperoleh sebesar $2,837$ lebih besar dari t tabel yaitu $2,039$. Besar pengaruh adalah $0,666130$ dengan tingkat signifikansi $0,008$.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan simpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
 - a. Hendaknya ke depan peningkatan PDRB ini diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan distribusi pendapatan sesuai dengan potensi

yang dimiliki oleh setiap daerah. Dengan adanya peningkatan PDRB dan pemerataan distribusi pendapatan maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang miskin.

- b. Hendaknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mencari pendekatan yang terbaik dalam menekan angka pengangguran sehingga dampaknya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pembuatan lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi tingkat pengangguran. Tidak hanya itu, pemerintah hendaknya menggiatkan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pemberian pinjaman modal untuk berwirausaha sehingga masyarakat diharapkan mampu mandiri dalam perekonomian.
2. Masyarakat hendaknya juga harus aktif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan baru dengan membuat usaha mikro kecil untuk membantu menaikkan kesejahteraan dan tentunya sedikit demi sedikit mengurangi angka kemiskinan.
3. Peneliti berikutnya supaya dapat menganalisis variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Oleh karenanya diperlukan penelitian mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Muh. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Adhi Saputra, Whisnu. “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Alhudori, M. “*Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*”, *Jurnal of Economics and Business*, Vol.1 No.1, Jambi: Universitas Batanghari, 2017.

Anggara Willy Putra, Dhimas. “*Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2013*”, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2015.

Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2007-2019*

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Data Tingkat Pengangguran Terbuka 2007-2018*.

-----, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2018*.

-----, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2019*.

Beik, Irfan Syauqi. Arsyianti, Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Burhan Bungin, M. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Pulik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Choirul Iqbal, Vighar. “*Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*”, Skripsi, Jember : Universitas Jember, 2015.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ekananda, Mahyus. *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, Edis Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Haughton, Jonathan. R. Khandker, Shahidur. *Handbook on Poverty & Inequality*, Terj. Tim Penerjemah World Bank, “Pedoman tentang Kemiskinan & Ketimpangan, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Huda, Nurul. dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ibrahim Hasyim, Ali. *Ekonomi Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran
- Kumalasari, Merna. “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata lama Sekolah, Pengeluaran*

- Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kelima, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018
- Kuncoro, Sri . “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011*”, Naskah Publikasi, Seurakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Made Tony Wirawan, I. Arka, Sudarsana. “*Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol. 4, No. 5, Bali: Universitas Udayana, 2015.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Mulyono, Sri. *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ed. 4, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno, *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 10 No. 1, Semarang: STIE Semarang, 2018
- Nanga, Muana. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Poltak Sinambela, Lijan . *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Priyatno, Duwi. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

- Puji Lestari, Riana. “*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Riyanto & Wikarya, Uka. *Statistika Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Saepul Hamdi, Asep. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Suluh Media, 2018
- Segoro, Waseso. Akbar Pou, Muhamad. “*Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012*”, Prosiding SNaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, ISSN 2089-359, EISSN 2303-2472, Depok: Universitas Gunadarma, 2016.
- Setya Ningrum, Shinta. “*Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukmaraga, Prima. “*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

- Susanti, Sussy. “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*”, Jurnal Matematika Integratif, Vol. 9 No. 1, Bandung: STIE Ekuitas, 2013.
- Syauqi Beik, Irfan. Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Tri Wahyudi, Setyo. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Warno, *Perspektif Ekonomi dari Sisi Tasawuf Islam*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 4, No. 1, Semarang: STIE Semarang, 2012.
- , *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU, Vol. 10 No. 1, Jepara: UNISNU, 2013.
- , *Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Tahun 2013*, Jurnal Economica, Vol. V, Edisi 1, Semarang: UIN Walisongo, 2014
- Widarjono, Agus. *Analisis Statistika Multivariat Terapan. Dilengkapi dengan SPSS Amos*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010
- Yoga Permana, Anggit. “*Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Yudi Wibisono, Radityo. “*Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013*”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

<https://banjarnegararakab.go.id/website/pemerintahan/gambaran-umum/>

<https://banjarnegarakab.go.id/website/pemerintahan/letak-geografis/>

<https://document.worldbank.org/curated/en/6647515531005733765/National-Account-Data-Used-in-Global-Poverty-Measurement>

<http://dashboard-smartcity.wonosobokab.go.id/p/4-kondisi-geografis>

<https://jatengprov.bps.go.id/>

<https://jatengprov.go.id/sejarah/>

<https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>

<https://rembangkab.go.id/geografis/>

<https://www.bappenas.go.id>

<https://www.bps.go.id>

<http://www.brebeskab.go.id/index.php/profil-daerah/sejarah>

<https://www.google.com/>

<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/21>

<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>

<https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>

<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/gambaran-wilayah-purbalingga/>

<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/pembagian-wilayah-administrasi/>

<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/sejarah/>

<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/topografi/>

<https://www.worldbank>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Penelitian Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Wonosobo
2.	Kab. Kebumen
3.	Kab. Rembang
4.	Kab. Brebes
5.	Kab. Purbalingga
6.	Kab. Pemalang
7.	Kab. Banjarnegara

Lampiran 2

Data variabel yang digunakan dalam penelitian

No	Kabupaten	Tahun	PDRB (X1)	TPT (X2)	Kemiskinan (Y)
			(Miliar Rp)	(%)	(%)
1	Wonosobo	2013	10333,76	5,82	22,08
		2014	10828,17	5,34	21,42
		2015	11334,08	4,47	21,45
		2017	12405,05	4,18	20,32
		2018	13017,63	3,44	17,58
2	Kebumen	2013	14333,33	3,52	21,32
		2014	15163,09	3,25	20,50
		2015	16115,55	4,14	20,44
		2017	17792,47	5,58	19,60
		2018	18773,83	5,52	17,47
3	Rembang	2013	9780,75	5,97	20,97
		2014	10284,27	5,23	19,50
		2015	10850,27	4,51	19,28
		2017	12138,57	3,19	18,35
		2018	12855,23	2,87	15,41
4	Brebes	2013	23812,06	9,61	20,82
		2014	25074,17	9,53	20,00
		2015	26572,83	6,49	19,79
		2017	29527,03	8,04	19,14
		2018	31094,90	7,27	17,17
5	Purbalingga	2013	12778,31	5,63	20,53
		2014	13397,71	5,13	19,75
		2015	14130,61	4,84	19,70
		2017	15612,29	5,33	18,80
		2018	16458,71	6,06	15,62

6	Pemalang	2013	13172,06	6,48	19,27
		2014	13898,67	7,44	18,44
		2015	14673,70	6,53	18,30
		2017	16343,95	5,59	17,37
		2018	17286,70	6,21	16,04
7	Banjarnegara	2013	11043,08	4,16	18,71
		2014	11629,85	4,06	17,77
		2015	12266,05	5,05	18,37
		2017	13663,27	4,72	17,21
		2018	14438,15	4,00	15,46

Lampiran 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	35	21314,15	9780,75	31094,90	15510,8614	5422,14999
TPT	35	6,74	2,87	9,61	5,4057	1,61870
Kemiskinan	35	6,67	15,41	22,08	18,9700	1,78381
Valid N (listwise)	35					

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,69731752
	Absolute	,076
Most Extreme Differences	Positive	,068
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,453
Asymp. Sig. (2-tailed)		,987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	18,631	1,080		17,244	,000		
1 PDRB	,000	,000	-,364	-1,648	,109	,581	1,720
TPT	,406	,243	,368	1,670	,105	,581	1,720

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,957	,592		3,308	,002
1 PDRB	2,358E-005	,000	,134	,593	,557
TPT	-,174	,133	-,295	-1,307	,201

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,481 ^a	,231	,182	1,51561	2,019

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,481 ^a	,231	,182	1,51561

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,443	2	10,721	4,667	,017 ^b
	Residual	71,209	31	2,297		
	Total	92,652	33			

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

Hasil Uji t dan Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,066524	,680		14,811	,000
	Lag_X1	-,000200	,000	-,495	-2,565	,015
	Lag_X2	,666130	,235	,547	2,837	,008

a. Dependent Variable: Lag_Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aminah
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 22 November 1996
Alamat : Desa Kebrengan RT 003/RW 002, Kecamatan
Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi
Jawa Tengah, Kode Pos 56351
No. Hp. : 085799215399
Email : aminahbsy@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. MI Ma'arif Kebrengan Lulus Tahun 2009
2. SMP Negeri 2 Garung Lulus Tahun 2012
3. SMK Takhassus Al-Qur'an Wonosobo Lulus Tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2015

Semarang, 20 Desember 2019

Penulis,

Aminah

NIM 1505026016